

# Efektivitas Penegakan Aturan Tata Tertib Sekolah SMP Negeri 2 Telaga Kabupaten Gorontalo

Dzulfajar Y Horop<sup>1</sup>, Zulaecha Ngiu<sup>2</sup>, Asmun Wantu<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 2025, 5-21

Revised 2025, 6-10

Accepted, 2025,6-21

### Keywords:

Effectiveness,

Discipline,

School

### How to Cite:

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan aturan tata tertib sekolah di SMP Negeri 2 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap guru, kepala sekolah, serta siswa yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan tata tertib di SMP Negeri 2 Telaga belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya tata tertib, lemahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan karakter anak, serta adanya pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan dan media sosial. Selain itu, pendekatan yang digunakan guru dalam menegakkan disiplin masih bersifat konvensional dan kurang inovatif, sehingga tidak menarik perhatian siswa untuk mematuhi aturan yang ada.

This study aims to determine the effectiveness of enforcing school discipline rules at SMP Negeri 2 Telaga, Gorontalo Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation of teachers, principals, and students involved in teaching and learning activities. The results of the study indicate that the enforcement of discipline rules at SMP Negeri 2 Telaga is not yet fully effective. This is caused by several factors such as the lack of student awareness of the importance of discipline, the weak attention of parents to children's character education, and the negative influence of the social environment and social media. In addition, the approach used by teachers in enforcing discipline is still conventional and less innovative, so it does not attract students' attention to obey the existing rules.

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### Corresponding Author:

Dzulfajar Y Horop

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo

Jln. Jenderal Sudirman No.6, Kota Gorontalo

[dzulfajarfajar@gmail.com](mailto:dzulfajarfajar@gmail.com)

## Pendahuluan

Sekolah merupakan suatu lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan serta merupakan tempat yang ampuh dalam membangun kecerdasan, sikap dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi realita kehidupannya. Untuk itu secara terus menerus perlu dibangun dan dikembangkan peran sekolah agar dapat menghasilkan generasi yang bertanggung jawab pada kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Peserta didik dalam mengadakan interaksi dengan seluruh warga sekolah yang memiliki latar belakang berbeda seperti: etnik, budaya, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, agama.

Keragaman tersebut berimplikasi pada perlakuan dan kebijakan dari multikultural yang dihadapi sekolah kepada para peserta didik dan warga sekolah lainnya. Sekolah tidak hanya dibebani mengembangkan kemampuan siswa dalam ranah kognitifnya saja, akan tetapi juga di perlukan pengembangan dari ranah efektif dan psikomotor. Tidak ada gunanya seorang anak memiliki

kemampuan pengetahuan (kogniti) lebih, tetapi tidak di dukung dengan sikap (efektif) dan psikomotor yang baik pula. Ketiga ranah ini yakni kognitif, efektif dan psikomotorik dapat di kembangkan dalam diri seseorang agar dapat menjadi manusia yang berkualitas dan beradab. Apabila salah satu ranah tidak berjalan dengan seimbang, maka akan mempengaruhi perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena saat ini yang muncul di masyarakat menunjukkan adanya penurunan kualitas pada generasi muda terutama di kalangan peserta didik.

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan. dapat ditekankan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan.

Tata tertib sekolah merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah yang berwenang dan diberlakukan bagi seluruh warga sekolah. Peraturan tersebut ditetapkan melalui orang tua, guru, atau teman bermain, tujuannya ialah membekali anak dengan pedoman perilaku yang di setujui dalam situasi tertentu. tata tertib sekolah disusun secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, guru dan karyawan administrasi. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, dan keharusan atau larangan-larangan yang telah ditetapkan sekolah. dalam hal peraturan sekolah misalnya, peraturan ini mengatakan pada anak apa yang harus dan apa yang tidak boleh di lakukan. tata tertib di sekolah menjadikan suatu lembaga berjalan pada arahnya untuk mencapai tujuan. namun, pada realitanya banyak terjadi kasus pelanggaran tata tertib disekolah.

Tata tertib sendiri menjadi beban bagi peserta didik. padahal di setiap lembaga pendidikan di dunia ini pasti memiliki tata tertib yang harus dilaksanakan semua hal perlu aturan agar dapat terkontrol dan terorganisir di jalan yang semestinya. begitu juga dengan lembaga pendidikan, tata tertib di ciptakan agar semua pihak sekolah khususnya peserta didik mendapatkan proses belajar mengajar yang efektif dan lebih baik. bayangkan saja jika di sekolah tidak ada tertib pasti akan mengalami kekacauan seperti jalan lalu lintas yang tidak punya aturan. akan terjadi kemacetan, kecelakaan dan marabahaya yang lainnya. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan maka aktifitas siswa di sekolah perlu diatur dalam suatu aturan yang disebut tata tertib. berarti dengan adanya tata tertib sekolah diharapkan dapat dijadikan rambu-rambu dalam berperilaku bagi semua siswa. perencanaan tata tertib sekolah penting karena dengan adanya tata tertib sekolah maka tujuan sekolah dapat tercapai.

Bentuk pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan siswa antara lain berupa terlambat datang ke sekolah, berkirim surat, membantah perintah, melalaikan tugas, membolos, berisik dalam kelas, ribut, ceroboh dalam tindakan, merusak benda-benda, nakal (berkelahi), marah, bersikap asusila. tata tertib sebagai penentu akan keberhasilan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. hal ini sangat penting untuk di lakukan karena jika tata tertib tidak sepenuhnya di laksanakan oleh salah satu dari peserta didik di suatu lembaga pendidikan akan menghambat suatu keberhasilan peserta didik itu sendiri. alangkah bagusnya jika semua peserta didik menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang pelajar.

Efektivitas penegakan tata tertib sekolah mengacu pada sejauh mana aturan yang ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten dan berpengaruh terhadap perilaku serta kedisiplinan siswa. Tata tertib sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. dalam hal ini guru dan seluruh personel sekolah lainnya harus mampu menjadi pembimbing, bahwa: Guru harus memenuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsekstif, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, kedisiplinan juga membutuhkan penopang agar bisa tetap survive, sesuatu yang bisa menjadikan kedisiplinan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya oleh anak didik, yaitu yang disebut dengan alat

kedisiplinan, salah satunya adalah hukuman, yaitu suatu alat yang menjadi alternatif terakhir setelah alat pendidikan lain tidak efektif digunakan.

Secara umum hukuman ini ditunjukkan untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk menjadi baik, setelah anak menyadari dan menyesali perbuatan salah yang telah dilakukannya. selain itu juga hukuman dapat mencegah timbulnya beberapa perilaku anak yang tidak dapat diterima atau mengacaukan. Hukuman selalu mengandung rasa tidak enak pada anak, oleh karena itu didalam memberikan hukuman pendidikan harus mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman pendidikan harus dengan sebaik mungkin menghindari hukuman fisik dan hukuman yang keras berdasarkan kekuasaan, sebab cara itu akan memupuk agresi dan kekerasan pula pada anak. Anak akan menjadi frustrasi dan reaksinya akan menimbulkan agresi dan rasa dendam, hukuman yang seharusnya menjadi alat kedisiplinan agar anak lebih teratur dan terarah menjadi tidak efektif lagi, sebab hukuman fisik ini mengandung rasa dendam. Oleh karena itu dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri dalam berbagi tindakan dan perilakunya. Timbulnya kesadaran siswa akan kewajibannya untuk memenuhi tata tertib sekolah diharapkan tertanam pada perilaku atau moral siswa. dimana anak akan berusaha membina, Mengembangkan dan menyempurnakan segenap potensi yang ada pada diri anak menuju proses pendewasaan. Pembinaan terhadap tata tertib siswa ini dilakukan terutama bagi siswa yang sering melakukan pelanggaran.

Perlu kita ketahui bersama bahwa masih banyak siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. kesadaran siswa tentang pentingnya tata tertib masih rendah, sehingga mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuinya. hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tua dalam menanamkan nilai disiplin di rumah. hal ini sering kali menyebabkan pelanggaran aturan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekolah. Adapun juga, metode pendekatan yang kurang variatif dan menarik dapat menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak terlibat dalam proses menaati peraturan sekolah. hal ini yang menjadi tantangan bagi guru untuk menemukan cara yang efektif dalam menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan peraturan tata tertib sekolah. Ketertiban peserta didik seringkali menjadi suatu masalah di sekolah, apalagi pada jenjang pendidikan sekolah menengah yang peserta didiknya beranjak dewasa dan mulai belajar mengenal jati diri yang dilakukan melalui peniruan diri atau imitasi.

Pada dasarnya masalah yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah adalah siswa masih saja melanggar aturan tata tertib sekolah. Padahal guru hampir setiap hari menyampaikan kepada siswa mengenai tentang tata tertib sekolah tetapi tetap saja dilanggar oleh siswa contohnya: siswa tidak menggunakan atribut yang lengkap saat kesekolah, siswa memiliki guntingan rambut yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. banyak anggapan dari peserta didik bahwa tata tertib sekolah hanya membatasi kebebasan sehingga berakibat pelanggaran tata tertib di sekolah. tanpa disadari kebebasan yang tidak bertanggung jawab akan merugikan diri sendiri, orang tua dan sekolah. hal ini dapat terlihat dengan banyaknya berita guru menegur siswa yang tidak mematuhi aturan tata tertib sekolah lalu siswa tersebut melaporkan guru yang menegurnya kepada orang tuanya sehingga orang tua siswa datang ke sekolah untuk memberontak karena tidak terima anaknya dimarahi oleh guru, nah inilah yang sering terjadi dikalangan orang tua siswa. tanpa mereka sadari bahwa siswa yang memiliki kesalahan karena tidak mematuhi tata tertib sekolah.

Berdasarkan penelitian awal di sekolah SMP Negeri 2 telaga bahwa siswa siswi di sekolah ini sudah di terapkan tetapi masih banyak siswa siswi melanggar efektivitas tata tertib sekolah. dan hal tersebut perlu di manifestasikan dalam sebuah tindakan karena masih banyak siswa yang tidak menaati peraturan yang berlaku sehingga efektivitas tata tertib yang diberlakukan oleh guru terhadap sekolah belum nampak pada diri setiap individu. apabila siswa yang melanggar biasanya diberi sanksi yang mendidik. pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak memakai atribut sekolah yang lengkap, rambut dimodel sedemikian rupa, bolos, terlambat datang sekolah, serta kurangnya kesadaran terhadap siswa. ari pelanggaran diatas banyak faktor yang mempengaruhi siswa yang kurang menunjukkan sikap disiplin, diantaranya lemahnya perhatian dari orang tua kepada anaknya di karenakan orang tua selalu sibuk dengan ekonomi, orang tua yang otoriter, keluarga yang broken home, pengaruh pergaulan di

lingkungan sekitar siswa, adanya perkembangan media elektronik, kurang demokratisnya pendekatan dari orang tua maupun guru yang ada di sekolah. dengan memberikan sanksi dan hadiah yang mendidik serta sistem skoring di sekolah pada siswa di harapkan dapat merubah sikap dan kurangnya moralitas serta bertanggung jawab.

## Kajian Teori

### Efektifitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Sementara itu, menurut (Pasolong, 2008) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pendapat (Kurniawan, Pendidikan karakter: konsepsi & implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, & masyarakat, 2013) bahwa efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1996) efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan. Menurut (Siagian, 2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai setidaknya sasaran yang telah ditetapkan. jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.

### Tata Tertib

Menurut (Sudarsono, 2007), tata tertib merupakan himpunan peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan kelompok atau organisasi, yang harus dipatuhi oleh semua anggota agar tercipta ketertiban dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. (Rahardjo, 2006) berpendapat bahwa tata tertib adalah bentuk hukum atau norma sosial yang bersifat mengikat dalam suatu lingkungan tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan bersikap agar tercipta keharmonisan sosial. Sementara itu menurut (Syaparuddin & Elihami, 2019) Tata tertib disusun dengan tujuan utama untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita pendidikan yang sejalan dengan standar dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas pendidikan. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk karakter dan etika seluruh sumber daya manusia di lingkungan sekolah, termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dengan adanya tata tertib yang terstruktur dan diterapkan secara konsisten, diharapkan setiap individu dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap visi serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dalam konteks pelaksanaan kegiatan pembelajaran, keberadaan tata tertib yang efektif akan mendorong terciptanya suasana belajar yang efisien, nyaman, tertib, dan kondusif. Disiplin yang dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan sekolah menjadi kunci utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

Dengan demikian tata tertib merupakan aturan yang diberlakukan kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkaran pekerjaan maupun dalam lingkungan sekolah. Dalam temuan (Setiawan & Putra, 2021) bahwa tata tertib sekolah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran menegaskan bahwa siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas tanpa izin dari guru, dan bagi yang

terlambat masuk kelas akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Siswa diharapkan mematuhi seluruh aturan demi menciptakan ketertiban belajar. Dalam hal berpakaian, siswa wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah dengan rapi, bersih, sopan, dan lengkap dengan atributnya. Khusus saat upacara, siswa harus tertib dalam berseragam dan mengikuti kegiatan dengan baik. Waktu kedatangan dan kepulangan siswa juga harus sesuai jadwal resmi dari sekolah. Sikap dan perilaku siswa diharuskan sopan terhadap semua warga sekolah, serta mematuhi peraturan agar kegiatan sekolah berjalan lancar. Guru berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan seluruh tata tertib dilaksanakan dengan baik. Selain itu, guru juga wajib membimbing siswa dalam mengenali, menyelesaikan masalahnya sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta memberikan bantuan agar siswa dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi. Guru juga harus menjadi teladan, seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan, aktif beribadah, dan memberi sanksi yang mendidik kepada siswa yang melanggar aturan demi membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas penegakan aturan tata tertib di SMP Negeri 2 Telaga, Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam konteks peran guru dalam membentuk kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna di balik perilaku, tindakan, dan interaksi yang terjadi secara alamiah tanpa manipulasi variabel. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi kontribusi guru, khususnya guru PPKn dan guru BK, dalam membina, mengarahkan, serta menegakkan aturan kepada peserta didik agar tercipta budaya disiplin yang berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu: observasi partisipatif langsung terhadap proses pembelajaran dan penerapan tata tertib di sekolah, untuk mengamati perilaku siswa serta tindakan guru dalam situasi nyata; wawancara mendalam yang melibatkan berbagai informan seperti kepala sekolah, guru PPKn, guru BK, wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta peserta didik, guna memperoleh sudut pandang subjektif dari berbagai pihak yang terkait; dan dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dokumen resmi seperti buku tata tertib, notulen rapat, data pelanggaran siswa, serta arsip kegiatan pembinaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data (menyortir informasi penting dari data mentah), penyajian data (mengorganisasi data dalam bentuk narasi atau matriks), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menyusun gambaran yang utuh mengenai bagaimana efektivitas peran guru dalam mendidik dan menumbuhkan kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah. Merujuk pada pendapat (Sugiono, 2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertumpu pada kenyataan empiris atau fenomena yang benar-benar terjadi di lapangan, dan digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang sedang berlangsung secara alami. Data yang diperoleh bersifat faktual dan murni, tanpa pengaruh dari asumsi, prasangka, ataupun rekayasa peneliti. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan yang objektif dan kontekstual, sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di SMP Negeri 2 Telaga.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Guru PPKn Dalam Menegakkan Aturan Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan mendidik. Peran guru, terutama guru PPKn, sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada siswa. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, pembimbing moral, dan pendamping karakter siswa. Dengan di SMP Negeri 2 Telaga telah menerapkan langkah strategis dalam menyosialisasikan tata tertib, seperti melalui

pembagian buku panduan saat orientasi, penyampaian saat upacara, keterlibatan wali kelas, dan penguatan oleh guru BK dan PPKn. Perilaku yang dilarang seperti terlambat, membawa HP ke kelas, berkata kasar, dan membully ditindak tegas karena berdampak negatif terhadap disiplin dan suasana belajar. Pada konteks ini, sanksi diberikan secara bertingkat berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga skorsing. Namun, sanksi tersebut tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengedukasi dengan pendekatan pembinaan, konseling, dan melibatkan orang tua. Peran guru BK menjadi sangat penting dalam membantu siswa memahami kesalahannya dan berubah ke arah positif. Dari sudut pandang siswa, mereka memahami pentingnya tata tertib dan menyadari bahwa aturan bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari pembentukan karakter. Meski sanksi kadang menimbulkan rasa malu, pendekatan persuasif dan pembinaan membuat mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki diri.

### **Tingkat Kepatuhan Siswa Terhadap Aturan Tata Tertib Sekolah**

Tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah merupakan indikator penting dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sekolah, melalui kepala sekolah, guru PPKn, guru BK, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam penegakan aturan, bukan sekadar hukuman. Sanksi diberikan berdasarkan pertimbangan mendidik, melalui dialog, pembinaan, dan konseling yang melibatkan wali kelas serta orang tua. Guru PPKn memastikan penerapan disiplin sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan guru BK mendampingi siswa agar memahami kesalahannya secara reflektif. Dari sudut pandang siswa, sanksi dianggap adil jika disampaikan dengan alasan jelas dan memberi ruang untuk memperbaiki diri. Sementara itu, keterlambatan siswa hadir di sekolah menjadi masalah utama yang mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab waktu, baik karena faktor internal seperti bangun kesiangan dan kurang disiplin, maupun eksternal seperti masalah transportasi. Sekolah telah melakukan langkah konkret seperti pengawasan gerbang, evaluasi rutin, pemberian sanksi edukatif, hingga konseling. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri.

## **Pembahasan**

### **Peran guru PPKn dalam menegakkan aturan tata tertib sekolah**

Guru PPKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, serta kesadaran hukum. Dalam menegakkan tata tertib sekolah, guru PPKn bukan hanya sebagai pelajar teori, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang membantu siswa untuk memahami pentingnya mematuhi aturan tata tertib sekolah. Berkaitan dengan peran berarti berbicara tentang kinerja serta keberhasilan seorang guru dalam membimbing siswa agar supaya siswa tersebut mampu melakukan perbuatan yang diharuskan dan yang dilarang. Daripada itu, guru PPKn juga mengajarkan nilai-nilai dasar seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran yang tercermin dalam aturan tata tertib sekolah. Melalui pembelajaran di kelas, siswa diajak memahami perbuatan yang harus dilakukan misalnya (datang tepat waktu, mengenakan seragam lengkap, menjaga kebersihan) dan perilaku yang dilarang (seperti merokok, berkelahi, atau membolos). Dalam hal ini sebagai figur yang dihormati, guru PPKn menjadi panutan dalam mematuhi dan menegakkan aturan. Perilaku guru sehari-hari menjadi cerminan nyata dari ajaran yang disampaikan, yang dapat mendorong siswa untuk meniru sikap positif tersebut. Adapun juga guru PPKn dapat memfasilitasi diskusi atau debat di kelas mengenai aturan sekolah, sehingga siswa tidak hanya tahu aturan, tetapi juga memahami alasan moral dan sosial dibalik aturan tersebut. Ini membantu membentuk kesadaran dan kepatuhan yang datang dari dalam diri. Selain itu, guru PPKn juga bekerja sama dengan wali kelas, guru BK, dan pihak sekolah lainnya dalam menyusun, menyosialisasikan, dan mengevaluasi tata tertib sekolah agar tetap relevan dan efektif dalam membentuk perilaku siswa.

Perbuatan perilaku yang diharuskan merupakan perilaku ini mencerminkan sikap positif yang harus dilakukan oleh siswa setiap hari sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan sebagai upaya menciptakan suasana belajar yang baik. Seperti halnya datang tepat waktu sebelum jam pelajaran dimulai, menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan sesuai aturan, bersikap sopan dan menghormati guru, staf, dan sesama siswa, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah, mengikuti upacara bendera dan kegiatan sekolah lainnya secara tertib, serta mengemban tanggung jawab sebagai siswa, seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan menjaga fasilitas sekolah. Adapun juga dengan perbuatan dan perilaku yang dilarang merupakan perilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan sekolah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti halnya membolos atau tidak masuk tanpa izin, berpakaian tidak sesuai aturan atau berpakaian tidak sopan, bertindak kasar, berkelahi, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap teman, membawa, menggunakan gadget secara tidak bijak di jam pelajaran seperti bermain game, atau mengakses konten tidak pantas. Mematuhi perbuatan yang diharuskan dan menjauhi yang dilarang merupakan bagian penting dalam membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan bermoral. Dengan kesadaran dan komitmen untuk menaati tata tertib, siswa turut menciptakan budaya sekolah yang positif dan mendukung proses pendidikan secara menyeluruh.

Pada konteks temuan peneliti di sekolah SMP Negeri 2 Telaga terkait dengan perbuatan dan perilaku yang diharuskan dan yang dilarang terdapat ada beberapa strategis yang dikemukakan oleh kepala sekolah untuk pentingnya menaati aturan tata tertib. Yang pertama, kami membagikan buku panduan tata tertib kepada seluruh siswa saat masa orientasi. Kedua, kami melakukan penyampaian rutin melalui apel pagi dan upacara bendera, dimana guru maupun saya sendiri menyampaikan pentingnya mematuhi aturan sekolah. Ketiga, wali kelas juga berperan aktif dalam memberikan penguatan saat jam bimbingan. Selain itu, kami menempelkan ringkasan aturan di beberapa sudut sekolah agar mudah dibaca siswa. Untuk memperkuat pemahaman, kami juga mengundang guru BK dan guru PPKn untuk memberikan sesi khusus untuk kewajiban, larangan, serta akibat pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman kepada siswa mengenai perbuatan dan perilaku yang harus dilakukan maupun yang dilarang, terutama agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong. Misalnya, tindakan membully bertentangan dengan sila kedua yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", sementara menyontek mencederai nilai kejujuran dan tanggung jawab. Guru PPKn berupaya mencegah perilaku menyimpang tersebut dengan pendekatan yang edukatif dan menanamkan kesadaran bahwa menaati aturan bukan sekadar bentuk kedisiplinan, tetapi juga bagian dari jati diri warga negara yang baik dan bermoral. Selain itu, melalui wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peneliti menemukan bahwa bidang ini memiliki peranan strategis dalam mencegah pelanggaran aturan melalui pengawasan langsung terhadap siswa pada saat masuk, istirahat, dan pulang sekolah, serta pemantauan rutin oleh guru piket dan wali kelas. Bidang kesiswaan juga menggandeng OSIS dan tim ketertiban sekolah untuk memberikan pengingat secara persuasif kepada siswa. Sementara itu, dari wawancara dengan siswa, peneliti memahami bahwa upaya guru PPKn dalam membentuk kepatuhan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kedisiplinan secara konsisten, serta menekankan bahwa melanggar tata tertib adalah bentuk perilaku yang tidak terpuji dan harus dihindari.

Perilaku mengganggu ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jika permasalahan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi hambatan kesulitan tersendiri bagi individu yang bersangkutan untuk mencapai penyesuaian yang memadai (Aprilia, 2013). Perilaku ini tidak hanya dialami pada jenjang pendidikan menengah atau perguruan tinggi tetapi juga jenjang pendidikan dasar. Kita harus melihat tingkat pendidikan dasar ini yang membutuhkan perawatan lebih lanjut terhadap siswa yang menunjukkan perilaku yang mengganggu. Sedangkan menurut Amirullah (2018) perilaku siswa didefinisikan sebagai sejumlah tindakan-tindakan nyata individu (siswa) yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor luar lainnya (eksternal) yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang yang diinginkannya dari definisi tersebut mengandung dua elemen penting dalam

perilaku siswa yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang semuanya melibatkan individu dalam menilai perilaku siswa tersebut. Atas temuan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan peneliti bahwa Perbuatan dan perilaku yang diharuskan maupun yang dilarang mengacu pada peraturan sekolah, di mana guru telah membagikan buku panduan tata tertib kepada seluruh siswa saat masa orientasi. Selain itu, guru PPKn juga menjelaskan kepada siswa di dalam kelas mengenai tindakan dan perilaku yang wajib dilakukan, seperti datang tepat waktu, mengenakan seragam lengkap, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Guru PPKn turut menegaskan perilaku yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan aturan tata tertib sekolah, seperti merokok, berkelahi, atau membolos.

Dengan demikian peserta didik diharapkan dapat mematuhi tata tertib. Adapun jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah harus siap menerima sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban pelanggaran yang dilakukan. Atas tersebut, tata tertib merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam suatu lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau masyarakat umum. Ketika seseorang melanggar tata tertib, maka ia harus siap menerima akibat atau sanksi atas pelanggarannya. Pada dasarnya sanksi atau hukuman diberikan bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memberikan efek jera, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan, menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran serupa, serta mendidik dan membina sikap disiplin. Sanksi atas pelanggaran tata tertib merupakan tanggung jawab langsung pelanggar, namun penanganannya harus dibimbing oleh pihak sekolah secara bersama-sama. Kepala sekolah, bidang kesiswaan, guru PPKn, dan guru BK, memiliki peran saling melengkapi dalam menegakkan aturan dalam pendekatan yang adil, mendidik, dan membina karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.

Pada konteks ini, hasil temuan peneliti bahwa beberapa siswa memiliki latar belakang keluarga yang kurang mendukung serta tingkat kesadaran diri yang masih rendah, terlihat dari kebiasaan seperti tidak memakai atribut lengkap, datang terlambat, dan melakukan pelanggaran berulang terhadap tata tertib sekolah. Akibatnya, siswa-siswa tersebut dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan selama ini dinilai cukup efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran lanjutan, terutama jika diiringi dengan pendekatan pembinaan yang tepat. Pihak sekolah tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan konseling dan melibatkan orang tua dalam proses pembinaan. Siswa yang melanggar biasanya dipanggil untuk dibina oleh guru BK serta diminta menandatangani surat pernyataan, meskipun dalam beberapa kasus tertentu diperlukan pendekatan yang lebih intensif karena sifat pelanggarannya yang berulang. Untuk itu, evaluasi tata tertib secara berkala terus dilakukan guna menciptakan aturan yang lebih mendidik serta mampu membentuk kesadaran dan karakter disiplin secara berkelanjutan.

Selain itu, bahwa peran mereka sangat penting dalam mencegah siswa melakukan pelanggaran tata tertib. Guru BK berfungsi sebagai pembina dan pendamping dalam proses pembentukan karakter serta kedisiplinan siswa, dengan pendekatan konseling yang berfokus pada pemahaman dan perubahan perilaku, bukan sekadar pemberian hukuman. Dalam pelaksanaannya, guru BK bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk melibatkan orang tua jika diperlukan. Guru BK menekankan bahwa pembinaan jangka panjang jauh lebih penting dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Dilain sisi lain bahwa peserta didik yang menerima sanksi, siswa merasa malu dan kecewa terhadap diri sendiri karena menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Namun, setelah mendapatkan pembinaan dari guru BK, mereka mulai memahami bahwa aturan sekolah dibuat bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Meski begitu, masih ada sebagian siswa yang belum menyadari pentingnya tata tertib, dan mereka belum memahami bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan dapat merusak nilai-nilai positif yang seharusnya dijaga dalam lingkungan sekolah.

Menurut William dalam (Purwanto, 2014), terdapat tiga jenis hukuman yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak yang menerimanya. Pertama adalah hukuman asosiatif, dimana seorang anak cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan untuk menghindari hukuman yang

akan diterimanya. Jenis kedua adalah hukuman logis, yang umumnya diterapkan pada anak-anak yang memiliki pemahaman yang lebih matang tentang hubungan sebab-akibat. Mereka menyadari bahwa hukuman yang diterima merupakan konsekuensi logis dari perilaku buruk yang mereka lakukan. Sementara itu, jenis ketiga adalah hukuman normatif, yang bertujuan untuk memperbaiki nilai moral anak-anak atau peserta didik yang telah melanggar norma etika, seperti berbohong atau mencuri. Hukuman ini lebih berfokus pada pemulihan nilai-nilai etika dan moralitas yang seharusnya menjadi dasar bagi perilaku anak-anak dalam interaksi sosial. Konsep ini mempertimbangkan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan orientasi moral yang kuat pada anak-anak dalam lingkungan pendidikan.

Semua sanksi ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada siswa terkait konsekuensi dari pelanggaran aturan, sekaligus menegakkan disiplin dilingkungan pendidikan. Pemberian hukuman bukanlah tujuan akhir, namun merupakan bagian dari upaya untuk membimbing siswa agar dapat lebih mematuhi peraturan serta menghormati tata tertib yang ada dalam lingkungan sekolah. (Setyaningrum, Rais, & Setianingsih, 2020) Pendidikan agama islam juga berperan penting dalam membentuk nilai dan perilaku, dengan tujuan menerapkan disiplin dan tata tertib dilingkungan sekolah untuk memperlancar proses belajar. Penggunaan tata tertib sekolah dengan penegakkan hukuman atau sanksi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin siswa.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan peneliti bahwa masih banyak siswa yang masih melanggar peraturan tata tertib sekolah baik itu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, serta pelanggaran berat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengacu pada aturan tata tertib yang harus diberikan sanksi. Adapun yang ungkapkan oleh bidang kesiswaan bahwa ada beberapa dari siswa yang memiliki latar belakang yang kurang mendukung, serta kesadaran dari siswa yang masih kurang cukup. Seperti tidak memakai atribut lengkap, dan datang terlambat hal inilah yang mereka lakukan terus-menerus mereka lakukan sehingga siswa tersebut mendapatkan sanksi atau hukuman. Hal lain pun yang diungkapkan oleh guru BK bahwa kami bertugas menangani siswa yang melakukan pelanggaran dengan pendekatan konseling bukan semata-mata menghukum. Hal ini menyatakan bahwa adanya persamaan data dilapangan beserta teori yang dipaparkan.

### **Tingkat Kepatuhan Siswa Terhadap Aturan Tata Tertib Sekolah**

Kepatuhan tata tertib sekolah adalah segala sesuatu yang harus menjadi nilai moral atau norma sebagai bagian yang harus ditanamkan sejak dini sehingga pada perkembangannya akan menimbulkan suatu pemahaman tentang nilai-nilai dan fungsi suatu peraturan yang mengikat kita bersama dalam suatu kehidupan sosial. Kepatuhan peserta didik dalam melaksanakan tata tertib disekolah dapat timbul baik dari dalam diri siswa atau karena pengaruh orang lain atau lingkungan siswa itu sendiri. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bila mana ada suatu aturan maka akan ada pula hukuman yang harus dijalani saat munculnya suatu pelanggaran dari aturan tersebut. Hukuman tersebut merupakan suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula berupa nonmaterial. Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai alat pendidikan dimana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik.

Adapun hasil dari observasi dilapangan terkait dengan ganjaran hukuman dan ancaman menghasilkan: hasil peneliti yang dilakukan disekolah bersama kepala sekolah, terkait dengan ganjaran hukuman dan ancaman. Pandangannya ialah bahwa hukuman sebaiknya digunakan sebagai sarana pembelajaran, bukan balas dendam. Fokusnya adalah memperbaiki, bukan memperlakukan. Adapun hukman yang diberikan harus bersifat profesional, mendidik, dan disertai penjelasan agar siswa memahami kesalahannya. Terkait bentuk hukuman yang dirasa terlalu keras atau tidak sesuai dengan kondisi psikologis anak. Namun, setiap keluhan harus ditanggapi secara serius melalui pendekatan komunikasi terbuka antara guru BK, wali kelas, dan pihak orang tua. Hal lain pun, bahwa para guru tidak

menjadikan ancaman sebagai metode utama dalam pelaksanaan disiplin, tetapi jika ancaman diterapkan bukan berarti untuk menakut-nakuti, melainkan agar siswa menyadari dampak dari perbuatannya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terkait ganjaran, hukuman, dan ancaman, bahwa hukuman merupakan bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan siswa, namun harus bersifat mendidik dan tidak merendahkan martabat peserta didik. Ancaman atau peringatan pun diberikan dalam rangka membangun kesadaran siswa agar tidak mengulangi pelanggaran, dengan tetap menjaga seluruh tindakan dalam koridor pembinaan edukatif. Sebelum menjatuhkan sanksi, biasanya dilakukan pendekatan personal terlebih dahulu melalui guru BK dan wali kelas guna memahami latar belakang perilaku siswa. Hukuman yang diberikan pun bersifat edukatif, seperti tugas sosial, membuat refleksi tertulis, atau keterlibatan dalam kegiatan positif lainnya. Hal serupa diungkapkan oleh guru PPKn bahwa ganjaran, hukuman, dan ancaman harus selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pelajaran PPKn, seperti Pancasila, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukuman diperlukan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab, namun harus diberikan secara adil, proporsional, dan mengarah pada pembelajaran, bukan hukuman yang bersifat menjatuhkan. Proses pemberian sanksi harus dilakukan dengan pertimbangan matang, mengedepankan prinsip keadilan, serta bertujuan membina dan menumbuhkan kesadaran siswa. Sementara itu, guru BK menyampaikan bahwa ganjaran atau hukuman memang merupakan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai, namun penanganan pelanggaran tidak menjadi ranah utama guru BK. Tugas utama guru BK adalah melakukan pendekatan korektif melalui konseling dan pembinaan karakter, bukan memberikan sanksi secara langsung. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai seperti keadilan dan pertimbangan moral menjadi acuan utama agar tindakan yang diambil benar-benar mendidik dan berorientasi pada perbaikan perilaku. Terakhir, pendapat dari siswa menunjukkan bahwa ganjaran dan hukuman yang diterapkan di sekolah sebaiknya bersifat adil dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kesalahan yang dilakukan, agar siswa mampu menyadari kekeliruannya dan tidak mengulanginya kembali di masa depan.

Temuan lain yang diperoleh dalam penelitian bahwa keterlambatan siswa menunjukkan bahwa keterlambatan merupakan bentuk pelanggaran kedisiplinan yang harus mendapatkan perhatian serius. Meskipun terlihat sepele, keterlambatan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk yang berdampak negatif terhadap rasa tanggung jawab, disiplin, dan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat humanis dan edukatif, yaitu dengan mengajak siswa berdialog, mendengarkan alasan mereka, dan memberikan pembinaan yang bersifat mendidik, serta sanksi yang membentuk kedisiplinan tanpa bersifat menghukum secara keras. Pandangan serupa diungkapkan oleh guru PPKn yang menilai bahwa keterlambatan bukan hanya persoalan waktu, tetapi juga mencerminkan lemahnya karakter kebangsaan, terutama dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kewajiban sebagai pelajar. Datang tepat waktu dipandang sebagai bentuk konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, karena keterlambatan dapat mengganggu proses belajar dan menciptakan ketidakadilan bagi siswa lain yang sudah berdisiplin. Guru BK juga menekankan bahwa keterlambatan harus dipahami lebih dalam sebagai indikator adanya masalah personal atau lingkungan, bukan semata pelanggaran tata tertib. Setiap perilaku siswa memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari kendala keluarga, kesulitan transportasi, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan. Oleh karena itu, guru BK berperan untuk membantu siswa menyadari dan memperbaiki perilaku melalui pendekatan konseling serta bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua jika diperlukan. Terakhir, tanggapan dari siswa sendiri menunjukkan bahwa mereka menyadari keterlambatan bukanlah tindakan yang baik karena dapat mengganggu proses pembelajaran dan mencerminkan kurangnya tanggung jawab. Beberapa siswa mengakui bahwa alasan keterlambatan bisa beragam, mulai dari bangun kesiangian hingga faktor eksternal seperti transportasi dan masalah keluarga. Namun demikian, siswa berharap agar keterlambatan tidak langsung dihukum tanpa pemahaman, melainkan disertai bimbingan yang membantu mereka menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab ke depannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Telaga, dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn sangat penting dalam menegakkan tata tertib sekolah untuk membentuk karakter siswa serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan kesadaran hukum. Hal ini mencakup beberapa aspek utama, yakni perbuatan dan perilaku yang diharuskan maupun yang dilarang, di mana perilaku positif seperti kejujuran, menghormati, menaati aturan, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, sedangkan perilaku negatif seperti berbohong, menyontek, atau membully harus dicegah karena berdampak merusak. Pelanggaran terhadap tata tertib membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dengan sanksi yang bersifat mendidik seperti teguran, tugas tambahan, skorsing, atau tindakan administratif lainnya. Selain itu, penggunaan ganjaran dan ancaman juga menjadi strategi penguatan perilaku; ganjaran memotivasi siswa untuk terus bersikap baik, sedangkan hukuman dan ancaman digunakan secara adil untuk memberikan efek jera tanpa merendahkan. Salah satu persoalan penting yang ditemukan adalah keterlambatan siswa hadir di sekolah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran waktu, faktor keluarga, jarak tempuh, serta kebiasaan buruk seperti tidur larut dan minimnya persiapan pagi. Oleh karena itu, peran guru PPKn dalam menyampaikan nilai disiplin dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa secara menyeluruh.

## Referensi

- Aprilia, W. (2013). Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal (studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 157-163.
- Gibson, L. J., Ivancevich, M. J., & Donnelly, H. J. (1996). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses* (edisi ke-8). Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan karakter: konsepsi & implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, & masyarakat*. Bengkulu: Perpustakaan Universitas Bengkulu.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto. (2014). *Evaluasi Hasil belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, D., & Putra, D. E. (2021). Peran Guru Dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah Di SDN 006 Bukit Kapur Kota Dumai. *Qalamuna -Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 661-670.
- Setyaningrum, Y., Rais, R., & Setianingsih, S. E. (2020). Peran Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin pada Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 520-526.
- Siagian, P. S. (2001). *Teori dan Praktik Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (2007). *Hukum dan Tata Tertib dalam Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaparuddin, & Elihami. (2019). Peranan Pendidikan Nonformal Dan Sarana Pendidikan Moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 173-186.